

KURANGI RESIKO TERTULAR COVID-19

Satpol PP DKI Bakal Pelototi Pergerakan Siswa di Luar Sekolah

JAKARTA (IM) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bakal pelototi pergerakan siswa selepas mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah untuk mengurangi risiko terjadi penularan Covid-19.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari Dinas Pendidikan terkait banyaknya siswa yang nongkrong atau berkerumun sambil jajan di pinggir jalan selepas mengikuti PTM di sekolah.

Hal tersebut dinilai berisiko besar terjadi penularan Covid-19 pada siswa. Untuk itu Satpol PP DKI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, bakal mengawasi pergerakan siswa di luar sekolah selepas PTM.

Arifin mengatakan, pihaknya akan segera mem-bubarkan dan meminta siswa segera pulang ke rumahnya masing-masing, bila menemukan ada yang berkerumun atau nongkrong-nongkrong selepas mengikuti PTM.

“Jadi kami masuk di situ, masuk di sana mengedukasi pedagang dan anak-anak siswa untuk tidak berkerumun dan melepas masker, makan di tempat dan seb-

againya, karena ini lagi-lagi sangat rentan ya resistensinya tinggi kalau mereka berkerumun buka masker,” kata Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/2).

Menurutnya, penularan Covid-19 pada siswa justru rawan terjadi di luar sekolah. Peralnya saat di lingkungan sekolah, terkait dengan protokol kesehatan (Prokes) siswa selalu dipantau oleh Satgas Covid-19.

“Jadi sekolah yang memang betul-betul memastikan semua Prokes dilakukan dengan baik. Tapi ada kendala dari pihak sekolah menyampaikan kepada kami ketika mereka keluar dari sekolah. ini yang sulit dipantaunya,” kata Arifin.

Jadi lanjut Arifin, prokes siswa saat mengikuti PTM menjadi tugas dari Satgas Covid-19 di sekolah masing-masing. Sementara Satpol PP bertugas memantau Prokes anak didik di luar sekolah selepas PTM.

“Ketika di dalam sekolah itu menjadi lingkup tanggungjawab sekolah. Kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan bukan yang di dalam,” pungkas Arifin. ● **yan**



FOTO : ANT

INDONESIA RAIH EMAS 50M RIFLE MIXED TEAM
Penembak Indonesia Diaz Kusumawardani (kanan) dan Fathur Gustafian (kiri) berpose usai menang pada partai final 50m rifle 3 positions mixed team Kejuaraan ISSF Grand Prix Rifle/Pistol di Jakarta, Rabu (16/2). Pasangan Indonesia Diaz/Fathur berhasil meraih emas setelah mengalahkan pasangan Thailand Jitrawee/Napis.

Mandek 3 Tahun, Proyek ITF Sunter Ditargetkan Selesai Tahun 2025

JAKARTA (IM) - Pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter masih dikebut Pemprov DKI. Proyek itu ditargetkan selesai pada 2025.

Ketua Komisi C DPRD DKI, Habib Muhammad bin Salim Alatas menanyakan progres proyek ITF Sunter dalam rapat laporan keuangan tahun anggaran 2021 dan penyerapan penyertaan modal daerah (PMD) serta proyekis deviden tahun anggaran 2022, Rabu (16/2).

“Progresnya sudah berapa persen, sudah mulai pembangunan kan yang di ITF Sunter?” tanya Habib Muhammad.

“Belum. Dalam satu bulan ini kita akan menetapkan konsultan untuk mendampingi kami untuk meng-exercise lagi tentang financial, me-review dari sisi ke-engineering-annya, juga mendampingi dalam proses pencarian mitra Juli nanti,” jawab Direktur Teknik & Pengembangan JakPro, Mo-hamad Apriandy.

“Sempat mandek berapa tahun?” kata Habib Muhammad.

“Tiga tahun. Pada era kami kan ITF yang paling siap di 12 kota hanya ITF Sunter. Karena teknologi sudah ada, lahan sudah ada, kita coba push juga bersamaan juga dengan (ITF) barat,” kata Apriandy.

Apriandy kemudian menjelaskan soal progres pembuatan ITF di Jakarta Barat. Dia mengatakan per 14 Februari kemarin tim konsorsium sudah mengirminkan feasibility study ke Dinas Lingkungan Hidup. Nantinya akan dilakukan pengkajian 1-2 bulan untuk penilaian layak atau tidak.

“Bersamaan itu konsorsium melakukan aksi aksi, karena selama ini belum koordinasi dengan PLN, kemudian jadi, mengurus PJBL... jadi secara target yang kami bicara dengan konsorsium tahun ini sudah dapat PJBL perjanjian jual-beli listrik PLN,” katanya.

“Ada potensi tahun ini peletakan batu pertama?” tanya Habib Muhammad.

“Kalau lihat skemanya masih panjang. Untuk financial plus skema pendanaan

kan sumber dana konsorsium masih cari pendanaan. Kalau skema yang dipakai itu dia pakai pendanaan dari Jerman, setelah financial plus biasanya 6 bulan setelah FS,” kata Apriandy.

Lantas Habib Muhammad kembali menanyakan progres studi kelayakan ITF di Jakbar. Apriandy kemudian menjawab belum selesai karena masih dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

“Kalau dibandingkan dua penugasan Pergub JakPro, Pergub 33 ITF Sunter, Pergub 65 Barat yang paling cepat dari sisi skema waktu memang Sunter. Teknologi sunter secara desain didesain seperti itu, secara teknologi dipertanyakan 2.200 ton itu bisa mampu untuk manuver dengan luas 3,3 hektare. Di bawah Sunter ada bunker 6.600 ton, dan bunker itu di bawah tanah,” tutur Apriandy.

Habib Muhammad kemudian meminta agar proyek ITF di Jakarta bisa segera dituntaskan. Hal itu untuk meminimalisasi anggaran kompensasi bau Bantargebang ke Pemkot Bekasi.

“Segeralah, biar kita sudah mulai action-nya. Action Sunter, action Jakbar ada kemungkinan uang bau kita ke Bekasi bisa manfaat,” kata Habib Muhammad.

Apriandy kemudian menerangkan PJBL dengan PLN jadi hal penting untuk memulai proyek ITF ini. Dia mengatakan berdasarkan tim konsorsium, PJBL itu akan rampung Oktober nanti.

“Ditargetkan dengan teman-teman konsorsium PJBL itu di Oktober,” paparnya.

Anggota DPRD DKI, Andyka, kemudian menanyakan lagi soal kapan pastinya ITS Sunter bisa selesai. Apriandy lalu menjawab ITF Sunter ditargetkan bisa mulai berproduksi di tahun 2025.

“ITF Sunter kapan mulai produksi komersil?” tanya Andyka.

“ITF Sunter kalau ditanya kapan selesai, jika memang proses tender pencairan mitra selesai di bulan Juli dan kita bisa melakukan pekerjaan di bulan akhir tahun, insya Alah 3 tahun dari tahun 2022 ini, di tahun 2025 sudah bisa berproduksi,” ucapnya. ● **yan**

4|Metropolis

IDN/ANTARA



PEMBEKALAN KADER BINTAL JAYAKARTA

Sejumlah Prajurit TNI mengerjakan soal saat pembekalan kader bintal Jayakarta di Aula Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (16/2). Kegiatan selama 14 hari dan diikuti 50 prajurit TNI di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta TA 2022 tersebut untuk membentuk kader pembinaan mental yang sesuai nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama.

Dua Bendungan untuk Tangani Banjir Jakarta Rampung Pertengahan Tahun

Dua bendungan kering yang bakal berfungsi mereduksi banjir Jakarta di Sungai Ciliwung itu adalah Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi sudah mencapai 73 persen, sedangkan Bendungan Ciawi 80 persen.

JAKARTA (IM) - Dua bendungan kering atau dry dam yang dibangun sejak 2017 untuk mengendalikan banjir Jakarta ditargetkan selesai pada pertengahan 2022. Waktu pengerjaan proyek yang diharapkan mereduksi banjir

Jakarta itu molor sekitar dua tahun dari target awal.

Dua bendungan kering yang bakal berfungsi mereduksi banjir Jakarta di Sungai Ciliwung itu adalah Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bendungan Ciawi terletak di Desa Cipayung, Desa Gadog, dan Desa Sukakarya di wilayah Kecamatan Megamendung, serta Desa Kopo di wilayah Kecamatan Cisarua. Sementara Bendungan Sukamahi berada di hulu Sungai Cisukabirus (anak Sungai Ciliwung), tepatnya di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung.

Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono mengatakan, progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi mencapai 73 persen, sedangkan Bendungan Ciawi 80 persen. “Kedua bend-

ungan ini Insya Allah bisa kami selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan sebelum pertengahan tahun (2022) diselesaikan,” kata Airlangga, Rabu (16/2).

Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak 1990-an. Namun, dua proyek bendungan kering pertama itu baru terealisasi pada 2017. Kontrak pembangunan bendungan kering itu masing-masing Rp 447,39 miliar untuk Sukamahi dan Rp 798,7 miliar untuk Ciawi. Dua bendungan ini jika rampung, maka dalam

periode ulang atau siklus 50 tahun, mampu mengurangi debit atau limpasan air Sungai Ciliwung tepatnya di Pintu Air Mangarai sebesar 11,9 persen.

Tanpa bendungan, volume air di Pintu Air Mangarai 655,03 meter kubik per detik. Sementara itu, jika dua bendungan ini berfungsi, debit Pintu Air Mangarai menjadi 577,05 meter per detik atau berkurang 77,98 meter kubik per detik. “Upaya kami (Ciawi-Sukamahi) adalah mengurangi risiko dampak,” ucap Airlangga. ● **yan**

Anggaran Dana Hibah Jakarta dalam APBD 2022 Sesuai Aturan

JAKARTA (IM) - Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan anggaran dana hibah yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, sudah sesuai dengan aturan.

Arifin menjelaskan, untuk hibah, mekanisme dan proses pengusulan dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

“Saya sampaikan mekanisme dan proses pengusulan hibah itu sudah diatur dalam Pergub 35, dan proses itu dilakukan mekanisme panjang, pembahasan bersama anggota dewan hingga jadi ketetapan dalam APBD,” kata Arifin, Rabu (16/2).

Ia mengatakan, semua pos anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD akan dijalankan pihaknya.

“Jadi semua yang sudah ditetapkan dalam APBD 2022 tentu kita akan lakukan sebagaimana ketentuan,” katanya.

Angka tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp757,21 miliar dan belanja

SKPD sebesar Rp1,38 miliar. Anggaran hibah untuk TNI/Polri sebesar Rp313 miliar itu masuk dalam belanja SKPD.

Berdasarkan data, hibah ratusan miliar itu masing-masing diberikan kepada Kodam Jaya sebesar Rp226,86 miliar; Komando Garnisun Tetap Ingin/Jakarta sebesar Rp4,77 miliar dan Polda Metro Jaya sebesar Rp82,08 miliar.

Untuk Kodam Jaya, anggaran itu digunakan untuk peningkatan manfaat Command Center Kodam dengan besaran Rp121,86 miliar. Lalu untuk penggantian lahan Kodim 0503/Jakarta Barat sebesar Rp105 miliar.

Lalu untuk Komando Garnisun Tetap Ingin/Jakarta, anggaran seluruhnya digunakan untuk pengadaan kendaraan Ops Dan satu 4 unit, kendaraan patroli Mako Gartap dan Subkogartap 0501 sampai dengan 0510 sebanyak 6 unit.

Sementara Polda Metro Jaya, anggaran digunakan untuk sistem pengamanan listrik udara Gedung Mako Polda dan pengadaan sistem kamera badan taktis terintegrasi Direskrim Polda. ● **yan**

Pemprov DKI Perbolehkan Warga Luar Jakarta Gunakan Fasilitas Isoter

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan fasilitas isolasi terkendali (isoter) bisa digunakan oleh warga dari luar Jakarta.

Wagub DKI itu mengatakan Pemprov DKI tidak membatasi asal daerah pasien yang membutuhkan.

“Sebetulnya ini kan untuk kemanusiaan. Kalau daerah mereka masing-masing tidak ada atau fasilitasnya penuh, tentu kami siap membantu,” kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan enam tempat isolasi terkendali. Dari enam tempat isoter yang disiapkan, masih banyak yang belum terpakai.

“Prinsipnya kita siap terkait tempat isolasi, tidak ada masalah, tetapi dari tempat yang ada pun banyak yang tidak terpakai,” ujarnya.

Enam fasilitas isoter milik Pemprov DKI memiliki 921 tempat tidur, tetapi baru terpakai 47 unit. “Ini berarti masih banyak yang sisa,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan enam lokasi isoter bagi pasien Covid-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG), gejala ringan, dan tidak memiliki komorbid. Sementara pasien bergejala sedang, berat dan kritis, harus dirawat di rumah sakit.

Hingga Selasa kemarin, 15 Februari 2022, tingkat keterisian tempat tidur isolasi atau bed occupancy rate (BOR) di 140 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta meningkat lagi menjadi 61 persen.

Wagub DKI mengatakan 4.196 pasien Covid-19 telah mengisi 6.888 tempat tidur tersedia. Angka itu menunjukkan BOR rumah sakit 61

persen, atau meningkat dari BOR pada Senin, yakni 59 persen.

Sedangkan keterisian tempat tidur di ruang perawatan intensif atau ICU terisi 405 pasien Covid-19 dari 880 tempat tidur tersedia atau 46 persen.

Riza mengatakan, peningkatan BOR di rumah sakit rujukan di Jakarta karena penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron lebih cepat ketimbang varian lainnya, dengan tingkat penyebaran Covid-19 sebanyak 61,70 persen merupakan transmisi lokal.

Kemarin, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI memprioritaskan fasilitas isolasi terkendali untuk warga menengah ke bawah. Dalam rapat dengan BPBD DKI itu, politikus Gerindra Inggard Joshua minta agar orang kaya isolasi mandiri di hotel. ● **yan**

Musrenbang di Tiga Kecamatan, Infrastruktur Jadi Usulan Prioritas

CIKARANG PUSAT (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Akhmad Marjuki, meminta kepada jajaran pimpinan di tingkat kecamatan untuk memrioritaskan usulan pembangunan yang dirasa mendesak. Hal itu dikatakan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan Kabupaten Bekasi, yang dilakukan secara virtual dengan 3 kecamatan sekaligus yakni, Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung dan Cikarang Barat, pada Selasa (15/2).

“Yang terpenting, semangat dari kades untuk mengusulkan apa yang sekiranya mendesak. Jika ada yang tidak diusulkan, bisa gunakan dana desa dulu atau bisa dengan dana swadaya dari masyarakat,” tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (15/2) malam.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Bekasi memastikan terkait Musrenbang itu bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan masyarakat melalui pemerintah desa, dan forum musrenbang kecamatan agar dapat direalisasikan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai tahapan-tahapan perencanaan pembangunan.

“Saya akan memastikan bahwa usulan yang datang dari masyarakat kepada para camat ini bisa diselesaikan di forum berkenaan, tentu harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai tahapan perencanaan pembangunan,” ucapnya.



FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA 2023 Tingkat Kecamatan Kabupaten Bekasi secara virtual, Selasa (15/2).

atahun 2023, yakni penertiban bangunan liar di beberapa jalan dan pasar, infrastruktur perbaikan jalan utama, pelebaran jalan penghubung antar desa, pengaturan lalu lintas, drainase dan pembangunan ruang kelas sekolah baru. Diharapkan, seluruh usulan tersebut dapat teralisasi, mengingat terwujudnya cipta kondisi masyarakat yang nyaman.

“Kami sebelumnya berterimakasih atas pormalisasian kali di Tambun Selatan, dan juga berharap adanya salah satu realisasi yakni penertiban bangunan liar di Jalan Kali Baru dan pelebaran Jalan Kali Baru,” ujarnya.

Tak hanya itu, Camat Cibitung, Encun Sunarto mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, saluran air, jembatan, perbaikan total beberapa sekolah SD Negeri dan SMP Negeri, penanganan banjir, kemacetan lalu lintas serta permasalahan sampah rumah tangga dan rehab puskesmas.

“Permasalahan yang telah kami usulkan tersebut, semoga dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Ya salah satunya, pembangunan jalan Kabupaten di

Jalan Raya Bosih sepanjang 5 kilometer,” katanya.

Terakhir, Camat Cikarang Barat, Doddy Gandi mengusulkan adanya pembukaan akses yang langsung terhubung dengan kawasan-kawasan industri, agar masyarakat lebih mudah menjangkau, perbaikan drainase, perbaikan gedung sekolah, fasilitas kesehatan serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena tingginya tingkat urbanisasi. Ia berharap, adanya sinergitas pemerintah daerah dengan berbagai pihak kawasan agar rencana yang sudah diusulkan dapat direalisasikan.

“Yang paling utama adalah pembukaan akses jalan untuk masyarakat ke kawasan industri karena mereka harus memutar jauh, kemudian pelebaran jembatan Kp. Rawa Palangan Desa Telaga Murni, perbaikan drainase U-Ditch Desa Danau Indah, perbaikan gedung sekolah, serta fasilitas kesehatan,” katanya.

Pada kegiatan Musrenbang virtual kali itu, hadir pula di tempat terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Tim Monitoring Musrenbang. ● **mdl**